

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara Nasional Pemerintah telah menjalankan program Reformasi Birokrasi Nasional sejak Tahun 2010. Saat ini Pemerintah Kota Jambi telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023. Dalam Road Map ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi 2019-2023.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi dalam melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi sekaligus berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel.

Reformasi Birokrasi pemerintah Kota Jambi periode 2013-2018 telah berjalan dengan baik dan setiap tahun telah dilakukan evaluasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Road Map ini disusun dengan mempertimbangkan capaian PMPRB pada akhir periode 2013-2018.

Secara umum, Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi 2019-2023 dikelompokkan menjadi 8 Program yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi.

**Program Manajemen Perubahan**, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk melakukan revolusi mental birokrasi sesuai dengan nawa cita yang merupakan 9 (sembilan) agenda prioritas. Sasaran utama revolusi mental yakni untuk mengubah *mindset* dan *culture set* dari dilayani menjadi melayani, melalui tiga komponen dasar Revolusi Mental yaitu: Membangun Integritas, Membangun Etos Kerja dan menghidupkan Budaya Gotong Royong.

**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, merupakan program prioritas untuk mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur yaitu peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk

membuka kemungkinan penyimpangan. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

**Program Penataan dan Penguatan Organisasi**, merupakan program untuk mengatasi permasalahan menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Keberhasilan program ini ditunjukkan melalui organisasi Pemerintah kota Jambi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan analisa beban kerja, analisa jabatan dan peta jabatan instansi Pemerintah Kota Jambi.

**Program Penataan Tata Laksana**, Pemerintah Kota Jambi melalui program ini berkomitmen meningkatkan sistem SOP kerja yang cepat dan sederhana dengan menerapkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan manajemen arsip yang berbasis IT untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dengan kriteria nilai skor survey kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah pelayan.

**Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur**, memiliki peranan penting agar kinerja SDM dan organisasi meningkat. Program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, yaitu: seleksi penerimaan CPNSD yang transparan dan akuntabel, Assesment tingkat dasar bagi pejabat baru eselin II, III dan IV serta JFU/JFT oleh assessor profesional, penyempurnaan informasi jabatan sesuai perkembangan organisasi, terbangunnya data base dan sistem informasi kepegawaian baik PNS maupun Non PNS, tingkat kedisiplinan dan penilaian kinerja pegawai, pemberian diklat bagi pegawai serta hasil assessment sebagai pengembangan SDM, karir, manajemen kinerja sebagai pengembangan kepemimpinan untuk perubahan.

**Program Penguatan Pengawasan**, merupakan program dengan mengharapkan hasil yaitu: meningkatnya kapasitas APIP, meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi, meningkatnya penetapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis, menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur dan meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK

**Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja**, untuk menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan dapat menyajikan laporan kinerja secara baik, Pemerintah Kota Jambi melakukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui beberapa program meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan kriteria keberhasilan meningkatnya nilai skor SAKIP Kota Jambi.

**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik dan meningkatnya kepatuhan SKPD layanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh entitas di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan polatindak dari seluruh jajaran Pemerintah kota Jambi, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terpadu dan utuh.